

ABSTRAK

Berbagai tindak pidana atau kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya yang sering terjadi ialah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur yang diawali dari adanya suatu rasa kepercayaan terhadap orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran dengan cara menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Bahkan dewasa ini banyak terjadi kasus penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi. Banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia tentang kejahatan penggelapan tentu sangat memprihatinkan. Salah satu contoh tindak pidana penggelapan dalam jabatan, ialah Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 289/Pid.B/2019/PN.Bdg. Dengan permasalahan hukum yang diangkat terkait bagaimanakah penerapan Pasal 374 KUHPidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 289/Pid.B/2019/PN. Bdg, dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan adanya kesaksian *unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 289/Pid.B/2019/PN. Bdg.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum pidana materiil maupun formil yang menyangkut permasalahan. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif dengan menganalisa peraturan yang diatur dalam Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini. Tahap penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan dengan mengumpulkan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi terhadap dokumen dengan menelaah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data menggunakan data kepustakaan serta analisis data secara yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa penerapan hukuman tersebut tergolong ringan dan lebih rendah bila dibandingkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum, meskipun Pasal 374 KUHP sendiri memuat ketentuan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. Kemudian pertimbangan hukum Majelis Hakim kurang memperhatikan keterangan saksi "*unus testis nullus testis* dan *testimonium de auditu*", meskipun telah ada persesuaian antara keterangan saksi dan terdakwa. Apabila Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Febrina Dwi masih dalam keadaan ragu (*dubio*), putusannya harus menguntungkan bagi terdakwa dengan kata lain memberikan putusan bebas (*vrijspraak*). Dasar pertimbangan Hakim menentukan berat atau ringannya didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan penggelapan yang dilakukan terdakwa. Penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah hal mudah. Hakim selain dituntut mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat.

ABSTRACT

Various criminal acts or crimes that occurred in the community, one of which is often the case is embezzlement in occupation. Embezzlement in occupation is an dishonest act that is in the start of a sense of trust in others, and the belief is lost because of the weakness of honesty by hiding the goods/property of others by one or more persons without the knowledge of the owner of the goods in order to master, or used for other purposes. Even today, many cases of embezzlement in occupation with various mode, showing the higher levels of this crime. Many case happened in Indonesia about the embezzlement is certainly very concern. One example of a embezzlement in occupation that occurred, was the decision of the District Court of Bandung No. 289/Pid.B/2019/PN.Bdg. With the raised problem related to how is the application of Article 374 of the Penal Code against the perpetrator of the embezzlement in occupation the ruling of Bandung District Court No. 289/Pid.B/2019/PN. Bdg, and how is the legal consideration the judge in dropping the ruling with the existence testimony of the unus testis nullus testis and testimonium de auditu in the ruling of Bandung District Court No. 289/Pid.B/2019/PN.Bdg.

The research method used by the authors in this study is an analytical descriptive, which describes the prevailing laws and regulations attributed to the legal theories and practices of material criminal law and the formyl perpetration concerning the problems. The method of approach used is normative by analyzing the regulations stipulated in article 374 Penal Code of the embezzlement in occupation, and other rules relating to this issue. The research phase is in the literature by collecting primary, secondary, and tertiary data sources. Data collection techniques are studies of documents by studying secondary data that includes primary, secondary, and tertiary legal substances. Data collection tool by uses library data and qualitative juridical data analysis.

Based on the results of this study, it is concluded that the application of the punishment is relatively light and lower when compared to the demands of the public prosecutor, although Article 374 Penal Code itself contains the provisions of imprisonment for a period of 5 (five) years. Then the legal consideration of the Panel of Judges does not attention to the testimony of the witness "unus testis nullus testicles and testimonium de auditu", although there has been a conflict between the witness's testimony and the defendant's. If the Judge in sentencing defendant Febrina Dwi is still in doubt (dubio), the verdict should be favorable to the defendant in other words give a free verdict (vrijspraak). The basis of the Judge's judgment determines the weight or lightness based on the principle of balance between guilt and the act of embezzlement committed by the defendant. Sentencing a defendant is not easy. Judges in addition to being required to base themselves on legislation, but must also attention to the feelings and public opinion of the society.